

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2015

DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI JAWA TIMUR

- Instansi** : Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur
- Visi** : Terwujudnya Kebutuhan Dasar Masyarakat Sejahtera melalui Pembangunan Bidang Keciptakaryaan yang Berkembang dan berkelanjutan, dengan Dukungan Konsistensi Penataan Ruang yang Dinamis
- Misi** :
1. Mewujudkan lingkungan permukiman yang layak huni dan mendorong masyarakat untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang sehat, aman, dan teratur
 2. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan sarana pelayanan air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman bagi masyarakat
 3. Memberikan arah pemanfaatan ruang yang mantap melalui penyusunan perencanaan dan pengendalian Tata Ruang yang lengkap dengan dilandasi oleh legalitas hukum
- Tujuan** :
1. Meningkatkan penyediaan rumah bagi KK Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
 2. Memenuhi hak dasar masyarakat atas air bersih dan sanitasi yang layak
 3. Meningkatkan kualitas perencanaan Tata Ruang yang dilandasi dengan legalitas hukum sehingga dapat digunakan sebagai acuan pemanfaatan dan pengendalian ruang

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2015**

SASARAN / OUTCOME / KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		FORMULA PERHITUNGAN		
Meningkatkan ketersediaan rumah bagi Masyarakat khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk menurunkan jumlah Backlog rumah	Persentase KK /Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang memiliki rumah layak huni	$\frac{\text{Jumlah KK/Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang memiliki Rumah layak huni}}{\text{Total KK/Masyarakat Berpenghasilan Rendah}} \times 100 \%$ <p>MBR = Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kriteria MBR :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penghasilan dibawah Rp. 4.000.000,00/bulan 2. Suami Istri tidak mempunyai rumah 3. Belum pernah menerima subsidi pemerintah untuk pemilikan rumah 4. Punya NPWP, Fotocopy SPT Tahunan PPh Perorangan atau surat Pernyataan bahwa penghasilan yang bersangkutan tidak melebihi yang disyaratkan <p>Kriteria Rumah Layak Huni :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi Persyaratan keselamatan bangunan 2. Pencahayaan, penghawaan dan sanitasi 3. Memenuhi kecukupan luas minimum 72 m2/orang sampai dengan 12 m2/orang <p>Kriteria Rumah Tidak Layak Huni :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Luas lantai perkapita kurang 8m2 2. Sumber air tidak sehat, akses memperoleh air bersih terbatas 3. Tidak mempunyai akses MCK 4. Bangunan tidak permanen,kayu berkualitas rendah atau atap/dinding dari bambu/rumbia 5. Tidak memiliki pencahayaan matahari dan ventilasi udara 6. Tidak memiliki pembagian ruangan 7. Lantai dari tanah dan rumah lembab/pengab 8. Letak rumah tidak teratur 9. Kondisi rusak 10. Belum pernah menerima bantuan pembangunan rumah dari berbagai pihak, termasuk bantuan bahan bangunan rumah 	1.Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur 2.Kabupaten/Kota se Jawa Timur 3. REI	Bidang Perumahan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur
	Persentase Rusunawa yang dihuni oleh Kepala Keluarga yang berhak	$\frac{\text{Jumlah Rusunawa yang dihuni oleh KK yang berhak}}{\text{Jumlah Rusunawa yang di huni}} \times 100 \%$		
Berkurangnya Permukiman Kumuh di Perkotaan	Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	$\frac{(\text{Jumlah Luasan Permukiman Kumuh Tahun } n-1) - (\text{Jumlah Luasan Permukiman Kumuh Tahun } n)}{(\text{Jumlah Luasan Permukiman Kumuh Tahun } n-1)} \times 100 \%$ <p>Kriteria Kawasan Kumuh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepadatan Bangunan lebih dari 110 bangunan/Ha 2. Kondisi Prasarana dasar Buruk (Jalan, Air Bersih, Sanitasi, Drainase, dan Persampahan) 3. Kondisi bangunan rumah tidak permanen dan tidak memenuhi syarat minimal untuk tempat tinggal 4. Permukiman rawan terhadap banjir, kebakaran, penyakit dan keamanan 	1. Strategi Pengembangan Kota (SPK) Kab/Kota 2. Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) Kabupaten/ Kota 3. RPIJM Kab/Kota	Bidang Perumahan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur
Meningkatnya cakupan pelayanan air minum yang layak	Persentase KK yang dapat layanan air minum yang layak	$\frac{\text{Jumlah KK yang mendapatkan pelayanan Air Bersih}}{\text{Jumlah KK yang membutuhkan pelayanan Air Bersih}} \times 100 \%$	1.Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur 2. Kabupaten/Kota se Jawa Timur	Bidang Air Bersih/PLP Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur

Meningkatnya cakupan pelayanan sanitasi yang aman	Persentase Rumah Tangga dengan layanan sanitasi yang aman	$\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga dengan layanan sanitasi}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100 \%$	3. BPS Tahun 2012	
Meningkatnya luas kawasan yang sesuai dengan RTRW	Persentase Luas Kawasan yang peruntukannya sesuai tata ruang	$\frac{\text{Luas Kawasan yang sudah sesuai dengan peruntukannya}}{\text{Luas Kawasan}} \times 100 \%$ <p>Kriteria Peruntukannya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan yang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2. Kawasan yang sesuai dengan zona pengendalian ketat (high control zone) 3. Kawasan Strategis Provinsi (yang sesuai dengan RTRW) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur 2. Kabupaten/Kota se Jawa Timur 3. Peta Analog Kabupaten/Kota 	Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur

Surabaya, 15 Januari 2016
**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

Dr. GENTUR PRIHANTONO SP. MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19590109 198712 1 002